

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurachman (1991), *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Azikin, Zainal (2001), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Brotodihardo, R. Santoso (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Djohansah, J. (2001), *Pengadilan Niaga di dalam Rudy Lontoh, Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumni.

Fuady, Munir (2012), *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Citra Aditya.

Hartono, Siti Soemarmi (1981), *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jogjakarta, Usaha Offset Printing.

Kashadi & Patrik, Purwahid (2009), *Hukum Jaminan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Lontoh, Rudy A. (2009), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumni.

Mahadi (2003), *Filsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung, PT Alumni.

- Mulyadi, Lilik (2013), *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung, P.T Alumni Bandung.
- Mulyadi, Kartini (2001), *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Dalam: Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau PKPU*, Bandung, PT Alumni.
- Mulyadi, Kartini (2005), *Kreditur Preferens dan Kreditur Separatis Dalam Kepailitan*, Dalam: Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum.
- Nugroho, Suyudi, A. (2004), dan Nurbyanti, H.S., *Analisa Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Pane, Marjan E. (2005), *Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit dalam Pelaksanaannya* di dalam Emmy Yuhassarie; *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum.
- Pramadya, Yan (1977), *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu.
- Purwadarminata, W.J.S.N. (1984), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Purwosutjipto, H.M.N. (1984), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 8 : Perwasitan, Kepailitan, Penundaan Pembayaran*, Jakarta, Djambatan.

- Sadikin, Zainal (2010), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Jakarta, PT Pustaka Reka Cipta.
- Shubhan, Hadi (2008), *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Sinaga, S. Valerie (2006), *Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga di Jakarta*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Press.
- Sjahdeni, Sutan Remy (2009), *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri (2004), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Roni Hanitjo (1982), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Susilowati, Etty (2011), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP Press.
- Usman, Rachmadi (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Yani, Ahmad & Wijaya, Gunawan (1999), *Sari Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuhassarie, Emmy (2005), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum.
- Yuhassarie, Emmy (2010), *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan